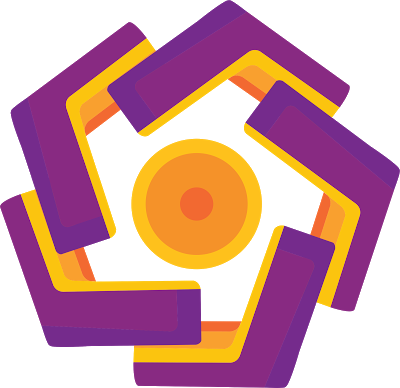
**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

MAKALAH POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

****

**Disusun Oleh :**

Fery Andriyani (14.11.7850)

Dhimas Dwi Nugroho (14.11.7857)

Wahidin (14.11.7816)

Yusuf Maulana (14.11.7811)

Ridho Brilianto (14.11.7844)

Arif Apriyatno (14.11.7867)

Yonanda Dwi Pratama (14.11.7849)

**S1 Teknik Informatika 04**

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

**2016/2017**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kami kesempatan, untuk menyelesaikan makalah ini makalah ini membahas tentang Politik dan Strategi Nasional.

Makalah ini berguna untuk pembaca untuk media pembelajaran baik formal maupun non formal sebagai penyusun kami akui banyak kekurangan pada makalah ini, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan agar dalam penyusunan makalah berikutnya bisa lebih baik.

**Yogyakarta, 22 Maret 2017**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunyaakan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik.

Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesiamasih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesiasudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi danmengatur sistem pemerintahannya sendiri.

Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yangterpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut,mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akanmendukung usaha dan tindak tanduk mereka.

Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan simpati dan empatiserta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-negara di dunia yangmenjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur.Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapanegara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu darikedua blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok Pada saat ituIndonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yangada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkankerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkanstrategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara.

Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anutoleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsaIndonesia. Kami akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami yang kami beri judul

“Politik Dan Strategi Nasional”.

* 1. **Tujuan**
* Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang sosial budaya;
* Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
* Untuk mengetahui bagaimana kaidah pelaksanaan politik dan strategi nasional;
* Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia.
  1. **Manfaat**
* Dapat diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi atau bernegara
* Menjadi politikus yang baik
* Memajukan Negara

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Pengertian Politik, Strategi dan Polstranas**

1. **Pengertian Politik**

Kata” politik”secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya dadalah polis,

berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan.Dalam bahasa indonesia,poloitik dalam arti politics mempunyai kepentingan umum warga negara satuan bangsa.Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan , cara , dan alat yangdigunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki.Dalam bahasa inggris,politics adalah suatu rangkaian asas (prisip), keadaan, cara, dan alat yangdigunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.Sedangkan policy, yang dalam bahasaindonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanana, adalah pertimbangan-pertimbangan yang di anggapdapat menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang di kehendaki.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

1. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh di katakan negara merupakan bentuk memasyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orangatau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu di peroleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.

1. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik.Dalam pengambilan keputusan perlu di perhatikansiapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.Jadi, politik adalah pengambilankeputusan melalui sarana umum.Kep[utusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatunegara.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dalam pemikirannya adalah bahwa masyarakatmemilih beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu rencanayang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakanoleh pihak yang berwenang.

1. Distribusi

Yang dimaksud distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting.Ia harus membagi secara adil.Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

1. **Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan.Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mencapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan danmengembangkan kekuatan ( ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

1. **Pengertian Politik dan Strategi Nasional**

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuansuatu cita-cita dan tujuan nasional.Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan,usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

**2.2 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional**

Penyusunan politik dan strategi nasional harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandungdalam sistem manajemen nasional yang berlandasan ideologi pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.Landasan pemikiran dalam sisitem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangkai acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnyaterkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa indonesia.

**2.3 Penyusunan Politik dan Strategi Nasional**

Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembagatersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden,Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,ke;lompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group).Suprastruktur daninfrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastuktur politik di atur oleh presiden/mandataris MPR.Dalam melaksanakan tugas ini presiden dibantu oleh berbagai lembagatinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti dewan stabilitasekonomi nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, DewanPenerbangan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim,Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan StabilitasPolitik dan Keamanan.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapaioleh rakyat indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harusmengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankamakan selalu berkembang karena:

* Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
* Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
* Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhankebutuhan hidup.
* Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakintingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tenologi.
* Semakin kritis dan terbukannya masyarakat terhadap ide baru.

**2.4 Stratifikasi Politik Nasional**

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
2. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional danmencakup :penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dannegara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan falsafah pancasiladan UUD 1945.
3. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti yang tercantum pada pasal 10 s.d 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakupkewenangan presiden sebagai kepala negara.
4. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yanglingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makrostrategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

Hasil-hasilnya yang dapat berbentuk :

1. Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945, pasal 5 ayat (1) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa).
2. Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenag penerbitannya berada ditangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2).
3. Keputusan atau instuksi presiden,yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, pasal 4ayat (1).
4. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat pula di keluarkan Makhlumat Presiden.
5. Tingkat Penentu Kebijakan khusus

Kebijakan khusus adalah penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi,administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang utama tersebut.

1. Tingkat Penentu Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan

1. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
2. Wewenang penentu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing-masing
3. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.Perumusan hasil kebijakan tersebut di terbitkan sebagai kebijakandaerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat 1, atau 2, keputusan dan instruksinyakepala daerah tingkat 1, atau 2.

**2.5 Otonomi Daerah**

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah’ yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota.

Perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru ialah :

* Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat ( Centralgovernment looking )
* Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah ( Localgovernment looking ). Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuaidengan tuntunan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya untuk semua daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkanmasyarakat madani.

**2.6 Kewenangan Daerah**

Kewenangan bidang lain, sebagai mana dimaksud poin ( 1 ), meliputi kebijakan tentang perancanaannasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonmian negara, pembinanaan serata pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan daya alam, teknoinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasinasional.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunnyai mempunyaikewenangan yang lebih luas dibandingkan ketika UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa masih berlaku.Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Bentuk dan Susunan pemerintahan daerah:

* DPRD sebagai badan Legislatif Derah ah sebagai dan pemerintahan daerah sebagaieksekutif daerah dibentuk di daerah.
* DPRD Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.

DPRD mempunnyai tugas dan wewenang yaitu :

* Memilih gubernur/wakil gubernur , Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
* Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.
* Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati,Walikota/ Wakil Wali Kota.
* Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
* Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati, dan WaliKota.
* Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, danWali Kota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan dan pelaksanaan kerjasama internasional, di daerah. Memberikan pendapatan dan pertimbangankepada pemerintah atas rencana perjanjian internasional yang mennyangkut kepentingandaerah. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

**2.7 Implementasi Politik dan Strategi Nasional**

1. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
2. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisanmasyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
3. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh danterpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agamadan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
4. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjaminkepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasihukum, serta menghargai hak asasi manusia.
5. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yangberkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengankebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang–undang.
6. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparatpenegak hukum, termasuk Kepolisian Negara RepublikIndonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakatdengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana danprasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yangefektif.
7. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas daripengaruh penguasa dan pihak manapun.
8. Mengembangkan peraturan perundang–undangan yangmendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi eraperdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
9. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah,murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotismedengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dankebenaran.
10. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, sertameningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakanhak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
11. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadappelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belumditangani secara tuntas.
12. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
13. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpupada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsippersaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhanekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitashidup, pembangunan berwawasan lingkungan danberkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang samadalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hakkonsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
14. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil sertamenghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik danberbagai struktur pasar distortif, yang merugikanmasyarakat.
15. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksiketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruhhambatan yang menganggu mekanisme pasar, melaluiregulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukansecara transparan dan diatur undang–undang.
16. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan ataskemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagifakir miskin dan anak–anak terlantar denganmengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui programpemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dankreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukandengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan denganundang–undang.
17. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi globalsesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulankompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagainegara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produkunggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam artiluas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, sertaindustri kecil dan kerajinan rakyat.

1. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
2. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu padakebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasionalyang diatur dengan undang–undang.
3. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalandengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dantuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan danpersatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangatPembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
4. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, danlembaga–lembaga tinggi negara lainnya denganmenegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yangmengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tatahubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif danyudikatif.
5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukanrakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupankepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik,serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemiluyang demokratis dengan menyempurnakan berbagaiperaturan perundang–undangan dibidang politik.
6. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalammemperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sertamengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadapkineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkanefektivitas, fungsi dan partisipasi organisasikemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadayamasyarakat dalam kehidupan bernegara.
7. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dankomprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkanbudaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagamanaspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hakasasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8. Politik Dalam Negeri
   1. Menegaskan arah politik luar indonesia yang bebas aktif berorensetasi pada kepentingannasional ,menitikberatkan pada soladaritas antar negara berkembang yang mendukung negarakamerdekaan.
   2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan danhajat orang banyak harus mempersatuan lembaga perwakila rakyat.
   3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur luar negeri melakukan depormasi proaktif dalam segala bidang.
   4. Meningkatkan kualitas dipormasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pem banguananmelalui kenerja ekonomi regional maupun internasionl.
   5. Meningkatkan kesiapan indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi pedagangan bebasterutama dalam menyonsong pemberilakuan AFTA,APEC DA WTO.
   6. Memperluas perjanjian ektradisi degan negara sahabat serta mempelancar prosudur dipolmatik dalam upaya meleksanakan bagian penyelesaia bagipenyelesaian masalah perkara pidana .
   7. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tertangga yang berbatasanlangsung dengan kawasaan ASEAN untuk memelihara kestabilan, pembanguan dan kesejateraan.
9. Penyelenggaraan Negara
10. Membersikan penyelenggaran negara dari pratek koropsi, kolusi ,dan nipotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejateraan dan prefesional seserta memberikaan sitem karier berdasarkan prsntasi dengan prinsip pemberian.
12. Melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat-pejabat pemerintahaan sebelum dan sesudah memangku jabataan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13. Meningkatkan fungsi dan propesionalime birokrasi dalam melayani masyarakat serta dalam mengelolah kekayaan negara secara transparan.
14. Meningkatkan kenerja kesejateraan pegawai negeri sipil ,tentra nasional dan kepolisian nasioanl republik indonesia.
15. Komuniasi ,informasi,dan media massa
16. Meningkatkan pemanfaatan peranan komunikasi memalu media massa modern dan tradisionaluntuk menjelaskan kehidupan bangsa .
17. Meningkatan kulitas komonikasi diberbagai bidang melalui pengusaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa menghadapi tantangan globalisi.
18. Meningkatkan peran pres yang dengan peningkataan kualitas dan sejahteraan insan pres.
19. Membanguan jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah dan serta antar daerah secara imbal balik daam rangka mendukung pembangun nasional.
20. Memperkuat sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khusus dari luar negeri.
21. Agama
22. Memantapkan fungsi peranan, dan kebudayaan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelanggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang–undangan.
23. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sitem pendidikan agama.
24. Menigkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama untuk menciptakansuasana harmonis dan saling menghormati .
25. Mempermudahkan umat agama dan menjalankan ibadahnya .
26. Meningkatkan peranan dan fungsi lembaga-lembaga keagaman dalam mengatasi dampat perubahaan yang terjadi disemua aspek kehidupan .
27. Pendidikan
28. Mengupayakan perluasaan dan pemeratahan kesempatan memperolah pendidikan yang bermutu tinggi.
29. Meningkatkan kemampuan akademis,profesionalme, dan jaminan kesejahteran bagi para pendidik.
30. Melakukan pembahruan sistem pendidikan ,termasuk pembaruan kurikulum untuk melayani keagamaan pendidik.
31. Memberdyakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sakolah.
32. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsipdesentralisasi otonomi keilmuan.
33. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
34. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dan memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan.
35. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesahatan .
36. Mengembangan sitem jamianan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ,keamanan dan kesejahteraan .
37. Membngun ketahaan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan.
38. Membanguan aspirasi terhadap penduduk kelanjutan usia dan veteran untuk menjaga harkat danmartabat .
39. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
40. Mengembangakan dan membina kebudayan nasional bangsa indonesia yang bersumber dariwarisan budaya leluhur bangsa .
41. Merumuskan nilai – nilai kebudayaan indonesia memberikan rujukan sitem nilai bagi totalitarilaku kehidupan ekonomi.

**KESIMPULAN**

POLITIK

* + Kata” politik”secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Strategi adalah cara untuk mencapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuansuatu cita-cita dan tujuan nasional. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

[**http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-politik-definisi-para-ahli-pengertian.html#**](http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-politik-definisi-para-ahli-pengertian.html)

[**https://books.google.co.id/books?id=606SEiPPl0AC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=pengertian+strategi+nasional&source=bl&ots=xmDiTFA8L0&sig=FPbUN4BeWlSjqgT7Ud-cdyT8Xs0&hl=id&sa=X&sqi=2&redir\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20strategi%20nasional&f=false**](https://books.google.co.id/books?id=606SEiPPl0AC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=pengertian+strategi+nasional&source=bl&ots=xmDiTFA8L0&sig=FPbUN4BeWlSjqgT7Ud-cdyT8Xs0&hl=id&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20strategi%20nasional&f=false)

[**https://srisetiawaty007.files.wordpress.com/2013/05/bab-iv-politik-dan-strategi-nasional-e2809c-politik-dan-strategi-pertahanan-keamanan-nasional1.pdf**](https://srisetiawaty007.files.wordpress.com/2013/05/bab-iv-politik-dan-strategi-nasional-e2809c-politik-dan-strategi-pertahanan-keamanan-nasional1.pdf)

[**http://mohnurhuda.student.umm.ac.id/2016/09/22/12/**](http://mohnurhuda.student.umm.ac.id/2016/09/22/12/)